

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat maupun pribadi dalam memenuhi pokok ekonominya untuk menjamin kelangsungan hidup. Beragam masalah kemiskinan pun tidak hanya berdampak pada lingkungan ekonomi saja melainkan menjadi masalah sosial dan mempengaruhi instabilitas politik dalam negeri. Tercatat dalam sejarah bahwa reformasi pada tahun 1998 di Indonesia diawali oleh krisis keuangan Asia dan berdampak pada tertekannya masyarakat marginal yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga, tidak heran jika kemiskinan menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan karena berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum (Lestari et al., 2023).

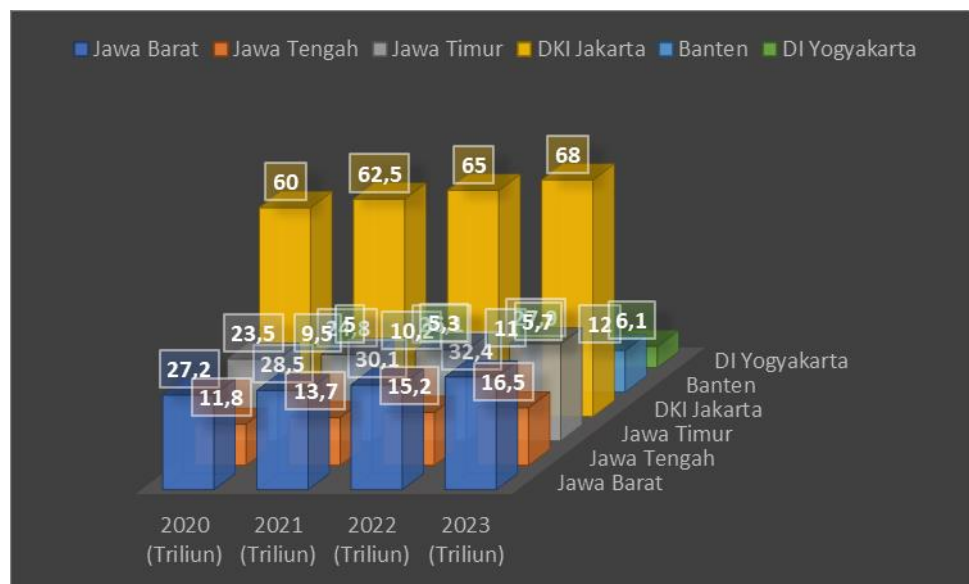
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan nasional dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya dan dapat diukur dengan pendapatan nasional per kapita. Peningkatan pendapatan nasional terjadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif yang diukur dengan naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi memiliki tiga indikator pokok, yaitu : (1) Indikator moneter, yaitu indikator yang berhubungan dengan uang, uang di sini berupa tingkat *income* yang diterima oleh masyarakat. Dalam indikator moneter ini

indikator yang diukur adalah pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita sering kali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang (NSB). (2) Indikator non moneter, indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Indikator ini mempunyai dua sub diantaranya ada indikator sosial, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. (3) Indikator campuran, indikator ini disebut campuran karena merupakan campuran dari indikator sosial dan indikator ekonomi (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan nasional, permasalahan kemiskinan juga merambat ke Provinsi Banten. Banten sebagai salah satu Provinsi di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan tentang kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 829,66 ribu jiwa dan menjadi Provinsi termiskin ke 8 di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang menjadi salah satu penyumbang penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan angka mencapai 16,67%.

Provinsi Banten masih memiliki jumlah kemiskinan yang sangat tinggi jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, berbagai faktor dapat mempengaruhi kemiskinan tersebut. Salah satunya pendapatan daerah, pendapatan daerah yang di dapat oleh Banten pada tahun 2023 hanya

mencapai 2,392,18 M. Angka tersebut menjadikan provinsi Banten menempati peringkat ke 5 dengan pendapatan daerah terendah di pulau Jawa. Pendapatan daerah yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa dapat menjadi tantangan bagi Provinsi Banten dalam mengatasi kemiskinan.



Sumber : BPS

Gambar 1. 1 Jumlah Pendapatan Daerah di Provinsi Pulau Jawa

Berdasarkan data pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya variasi signifikan antar provinsi di Pulau Jawa. Perbandingan pendapatan daerah antar provinsi di Pulau Jawa memberikan gambaran tentang potensi ekonomi dan kemampuan masing-masing daerah dalam mengatasi kemiskinan. Provinsi Banten perlu berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, menyelesaikan masalah kemiskinan adalah tanggung jawab semua orang, terutama bagi pemerintah,

yang berfungsi sebagai pengatur proses perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam pemerintahan diharuskan untuk menemukan solusi yang tepat untuk menangani kemiskinan. Sangat disarankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana proses pembangunan daerah agar tidak dapat menyebabkan kemiskinan (Putrizain et al., 2022). Terdapat disparitas kemiskinan yang cukup besar antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, kabupaten Tangerang yang begitu banyak penduduk miskin dan juga pada tahun 2023 Kota Tangerang menjadi Kota termiskin ke 2 dengan penduduk miskin mencapai 137,7 Ribu jiwa sedangkan Kota Cilegon dengan penduduk miskin terendah dengan angka kemiskinan hanya mencapai 18,2 Ribu jiwa pada tahun 2023. Secara terperinci penduduk miskin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 - 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Jiwa)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	117,3	116,2	114,1	120,4	131,4	114,7	114,23
Kab Lebak	111,1	108,8	107,9	120,8	134,8	117,2	114,54
Kab Tangerang	191,6	190,1	194	242,2	272,4	270,5	276,33
Kab Serang	69,1	64,46	61,54	74,8	83,09	75,45	73,83
Kota Tangerang	105,3	103,5	98,37	118,2	134,2	132,9	137,7
Kota Cilegon	14,89	13,96	13,2	16,31	18,89	16,46	18,2
Kota Serang	36,97	36,21	36,21	42,24	47,91	42,56	44,99
Kota Tangerang Selatan	28,73	28,21	29,16	40,99	44,57	44,29	46,31
Provinsi Banten	675	661,4	654,5	776	867,2	814	826,13

Sumber: BPS Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2023

Melihat dari tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Banten dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun terdapat fenomena ketimpangan antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. Beberapa Kabupaten dan Kota memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak misalnya Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 yang mencapai angka 270,22 ribu jiwa hal tersebut menjadi angka tertinggi di Banten, sedangkan data terendah terjadi di Kota Cilegon, pada tahun 2023 hanya mencapai 16,46 ribu jiwa. Hal tersebut menjadi fenomena kesenjangan jumlah penduduk miskin di Banten.

Adapun teori terkait permasalahan dari variabel yang diteliti yaitu pandangan ekonomi Klasik seperti yang dikembangkan oleh Adam Smith, Adam Ferguson dan Thomas Malthus, memandang kemiskinan sebagai hasil dari kekurangan efisiensi dalam pasar. Mereka percaya bahwa kemiskinan akan berkurang dengan sendirinya jika pasar bebas diperluas dan pertumbuhan ekonomi di pacu.

Teori ekonomi Keynesian seperti yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, memandang kemiskinan sebagai hasil dari kekurangan permintaan agregat, mereka percaya bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi kegagalan pasar dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Teori Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus pada akhir abad ke-18. Dalam bukunya *“An Essay on the principle of*

population” (1798), Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu melebihi kemampuan produksi pangan, kecuali ada kendali yang tegas terhadap pertumbuhan populasi. Malthus berargumen bahwa penduduk cenderung tumbuh secara geometris (berlipat ganda : 1,2,4,8,dst) sedangkan produksi pangan hanya bertumbuh secara aritmetis (1,2,3,4,dst) (Priyono dan Zainuddin Ismail, 2017).

Teori pengangguran struktural, pengangguran terbuka juga dapat dijelaskan melalui teori pengangguran struktural. Teori ini menyoroti bahwa ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan pengangguran. Perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja sering kali menyebabkan tenaga kerja yang tidak terampil atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai menjadi sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka tetap menganggur meskipun aktif dalam mencari pekerjaan (Wardhana & Nugroho, 2006).

Laju pertumbuhan penduduk, juga dideskripsikan sebagai angka yang mencatat persentase penambahan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kontrol akan meningkatnya pertumbuhan penduduk sangat perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak terkendali dapat menyebabkan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di kalangan ahli pembangunan sudah ada kesepakatan bersama bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk sangat berdampak terhadap penawaran bahan pangan dan juga menciptakan masalah bagi

cadangan devisa, pembangunan tabungan dan sumber daya manusia (M. Ananda, 2022).

Malthus menjelaskan mengenai suatu kondisi yang harus diantisipasi yang mana kondisi yang akan terjadi adalah ketika peningkatan populasi akan berhenti karena sumber daya yang menopang kehidupan tidak akan cukup untuk mendukung populasi manusia yang akan meningkat. Teori ini disebut dengan *Malthusian Population Trap* (Umara, 2021). Pertumbuhan yang tinggi dan tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara (Aufa et al., 2022). Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengurangi pendapatan dan tabungan, meningkatkan angkatan kerja, pengangguran dan pada tahap selanjutnya akan meningkatkan kemiskinan. Secara terperinci pertumbuhan penduduk di provinsi Banten tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab/Kota Provinsi Banten 2017-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	0,39	0,32	0,24	0,99	1,64	1,54	1,13
Kab Lebak	0,68	0,6	0,52	1,38	2,03	1,93	1,22
Kab Tangerang	3,08	3,01	2,93	1,32	1,97	1,87	1,3
Kab Serang	0,61	0,53	0,46	1,42	2,07	1,97	1,32
Kota Tangerang	2,21	2,12	2,04	0,51	1,16	1,05	1,05
Kota Cilegon	1,53	1,46	1,37	1,46	2,11	2,01	1,29
Kota Serang	1,77	1,68	1,59	1,76	2,42	2,31	1,64
Kota Tangerang Selatan	3,21	3,13	3,04	0,47	1,12	1,01	0,99
Provinsi Banten	2,01	1,94	1,87	1,1	1,76	1,66	1,22

Sumber: BPS Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2023

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten dari tahun 2017 hingga 2023, terdapat variasi pertumbuhan antara

kabupaten/kota. Kabupaten seperti Pandeglang, Lebak dan Serang memperlihatkan tren peningkatan laju pertumbuhan yang stabil hingga 2021, meskipun ada penurunan kecil pada 2022. Sementara itu, wilayah kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang mengalami penurunan laju pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah tahun 2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Banten secara umum menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Banten mencapai 826,13 ribu jiwa. Daerah-daerah dengan pertumbuhan penduduk yang lebih rendah, seperti kota Tangerang dan kabupaten Tangerang mungkin memiliki kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan penduduk bermigrasi ke daerah lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang rendah dapat berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah di wilayah urban. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2009), pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di daerah miskin dapat memperburuk tingkat kemiskinan karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi dan peluang kerja. Lebih lanjut, Amartya Sen dalam buku *“An Essay on the principle of population”* menjelaskan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh aksesibilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang terbatas.

Pengentasan kemiskinan juga dapat dilihat dari pembentukan sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan, yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas seseorang. Tersedianya fasilitas

pendidikan dan kenaikan jenjang pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Rendahnya partisipasi pendidikan dan angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin disebabkan karena tidak memiliki dana yang cukup untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, karena pendidikan tinggi membutuhkan dana yang relatif besar. Pendidikan sebagai modal manusia merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas negara karena merupakan sarana masyarakat untuk menjadi lebih cakap dan terampil. Sehingga dengan keterampilan ini, masyarakat dapat menghasilkan *output* lebih banyak dan memperbaiki perekonomian (Johar, 2023).

Tabel 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	6,63	6,72	6,96	7,10	7,11	7,13	7,15
Kab Lebak	6,20	6,21	6,31	6,40	6,41	6,59	6,60
Kab Tangerang	8,24	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92	8,93
Kab Serang	7,17	7,18	7,33	7,50	7,51	7,78	7,79
Kota Tangerang	10,29	10,51	10,65	10,69	10,83	10,84	10,91
Kota Cilegon	9,69	9,73	9,74	9,87	10,08	10,34	10,38
Kota Serang	8,61	8,62	8,67	8,76	8,89	8,9	8,91
Kota Tangerang Selatan	11,77	11,78	11,8	11,81	11,82	11,84	11,85
Provinsi Banten	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13	9,15

Sumber: BPS Provinsi Banten Dalam Angka 2017-2023

Tabel 1.3 yang menyajikan data rata-rata lama sekolah yang menjadi salah satu dimensi pengukuran indeks pembangunan manusia, menurut teori semakin besar angka yang menyajikan rata-rata lama sekolah berarti

kualitas pendidikan di suatu wilayah baik dan juga semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat. Jika mengacu pada tabel 1.3 di atas Kota Tangerang yang selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan dan menjadi kota dengan kualitas pendidikan yang baik, Berbeda halnya dengan Kabupaten Lebak yang hanya mencapai angka 6,2 pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan sampai angka 6,59 pada tahun 2023 menjadikan Kabupaten dengan kualitas pendidikan yang buruk di Banten.

Rasio jenis kelamin merupakan penduduk laki-laki dan rasio penduduk perempuan dalam populasi di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dan menyatakan jumlah per 100 perempuan (Asnidar et al., 2022). Data relasi gender dari perspektif gender, khususnya tentang keseimbangan pembangunan antara populasi laki-laki dengan populasi perempuan, bermanfaat dalam merumuskan rencana pembangunan. Pengukuran ini perlu dicapai untuk menemukan perbandingan antara jumlah kedua jenis kelamin di beberapa daerah Provinsi Banten. Secara umum, rasio jenis kelamin yang tidak seimbang dapat memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Rasio jenis kelamin yang tidak seimbang dapat berdampak pada pasar tenaga kerja, akses sumber daya, dan kerentanan sosial, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Terdapat disparitas jumlah rasio jenis kelamin pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak dengan skor 105,83 pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding perempuan, sedangkan di Kota Tangerang

Selatan pada tahun 2023 skor rasio jenis kelaminnya hanya menunjukkan angka dengan skor 99,75 yang berarti bahwa di daerah tersebut penduduk perempuan lebih banyak di banding laki-laki. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan data rasio jenis kelamin Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dari tahun 2017-2023.

Tabel 1. 4 Rasio Jenis Kelamin di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Rasio jenis kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2023
Kab Pandeglang	104,30	104,23	104,16	105,51	105,4	105,27	105,14
Kab Lebak	105,01	104,94	104,88	106,14	106,04	105,94	105,83
Kab Tangerang	104,69	104,61	104,53	104,78	104,63	104,47	104,31
Kab Serang	102,80	102,72	102,66	104,73	104,61	104,48	104,35
Kota Tangerang	104,17	104,1	104,02	102,41	102,22	102,03	101,83
Kota Cilegon	104,28	104,22	104,11	103,22	103,08	102,95	102,80
Kota Serang	105,11	105,09	104,94	104,69	104,57	104,45	104,30
Kota Tangerang Selatan	101,46	101,39	101,32	100,29	100,12	99,94	99,75

Sumber : BPS provinsi Banten Dalam Angka 2017-2023

Jika dilihat dari tabel 1.4 yang menyajikan data rasio jenis kelamin di provinsi Banten dari tahun 2017 hingga 2023 dapat diartikan bahwa jumlah rata-rata penduduk didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2020 di setiap Kabupaten/Kota mengalami kenaikan meskipun tidak cukup signifikan, Hitungan ini juga dapat mempengaruhi perekonomian di Provinsi Banten sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan langkah kebijakan apa yang semestinya harus diambil. Teori *Missing Women*, Amartya Sen yang mengembangkan teori “*missing women*” untuk menjelaskan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin di beberapa negara terutama di Asia

Selatan dan Asia Timur yang diakibatkan oleh diskriminasi gender, preferensi anak laki-laki dan praktik seperti aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin. Sen menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi jangka panjang, seperti ketimpangan gender di pasar kerja dan beban ekonomi dalam masyarakat (Klasen & Wink, 2003).

Tingkat pengangguran yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas atau lapangan pekerjaan yang cukup dapat mempengaruhi kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masalah dalam perekonomian karena dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat hal ini dapat berujung pada kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tabel 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab Pandeglang	8,30	8,19	8,67	9,15	7,7	9,24	9,05
Kab Lebak	8,88	7,57	7,96	9,63	7,86	8,55	7,57
Kab Tangerang	10,57	9,63	8,92	13,06	9,06	7,88	6,94
Kab Serang	13,00	12,63	10,58	12,22	10,58	10,61	9,94
Kota Tangerang	7,16	7,39	7,14	8,63	9,07	7,16	6,76
Kota Cilegon	11,88	9,21	9,64	12,69	10,13	8,1	7,25
Kota Serang	8,43	8,1	8,07	9,26	9,41	8,17	7,45
Kota Tangerang Selatan	6,83	4,67	4,78	8,48	8,6	6,59	5,81
Provinsi Banten	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2017-2023

Berdasarkan tabel 1.5 di atas Tingkat pengangguran tertinggi ada di Kabupaten Serang dengan persentase di 2023 sebesar 10,61% dan yang terendah ada di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 6,59%. Jika dilihat dari data tersebut jumlah pengangguran yang cukup tinggi sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yang pertama kurangnya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing dengan jenis lapangan pekerjaan yang ada.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka identifikasi masalah yang dapat di ambil sebagai dasar kajian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio jenis kelamin dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap jumlah kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Banten pada tahun 2017 - 2023?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio jenis kelamin dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama sama terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota tahun Provinsi Banten tahun 2017 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio jenis kelamin dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017 - 2023
2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio jenis kelamin dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama sama terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2017 – 2023?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio jenis kelamin dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Banten.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan jumlah penduduk miskin.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, bahan informasi, serta sumber data bagi akademisi lainnya sebagai penunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi dan literatur mengenai kemiskinan dan hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS)

1.5.2 Jadwal penelitian

